

ADDRESSING EQUITY IN EDUCATION FOR MARGINALIZED COMMUNITIES



MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKEADILAN BAGI MASYARAKAT YANG TERMARGINALKAN

Studi Kasus Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah

ADDRESSING EQUITY IN EDUCATION
FOR MARGINALIZED COMMUNITIES

**MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKEADILAN
BAGI MASYARAKAT YANG TERMAGINALKAN**
(Studi Kasus Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Jakarta,
Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah)

Tim Penulis:
Udin Kh. dan Tim

Cetakan Pertama:
Desember 2022

Diterbitkan oleh:
Network for Education Watch Indonesia (NEW INDONESIA)/
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
Jl. Cililitan Kecil III No.12, RT.12/RW.7, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640

**MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKEADILAN
BAGI MASYARAKAT YANG TERMAGINALKAN**
(Studi Kasus Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Jakarta,
Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah)

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, termasuk dalam hal pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan di negeri ini. Akan tetapi, pada tataran empiris, jaminan tersebut masih sebatas angan bagi warga Indonesia khususnya kaum marjinal. Mereka hingga kini masih terkendala akses dan tidak bisa bersekolah. Harusnya, Indonesia tak lagi punya masalah dengan akses. Negara-negara lain sudah berbicara soal kualitas pendidikan, tapi kita masih punya problem serius soal akses.

Apalagi di masa pandemi Covid-19, dunia pendidikan terdampak sangat besar. Salah satunya, peningkatan angka putus sekolah karena anak didik ikut membantu ekonomi keluarga selama pandemi. Anak-anak yang putus sekolah untuk anak SD saja mengalami peningkatan 10 kali lipat dibanding tahun 2019. Banyak sekali tekanan dari orang tua khususnya tekanan ekonomi yang memaksa mereka untuk mengajak anaknya bekerja. Ini juga berakibat pada naiknya tingkat kesenjangan pembelajaran antara anak-anak dari kelompok dari keluarga kaya dengan keluarga miskin. Kesenjangan ini meningkat sebesar 10 persen dibanding tahun 2019.

Di DKI Jakarta, menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), DKI Jakarta memiliki angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 0,69%. Sedangkan rata-rata nasional, angka putus sekolah di kalangan murid Sekolah Dasar (SD) secara nasional berada di level 0,18% pada tahun ajaran 2020/2021. Ini mengkhawatirkan mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta adalah yang tertinggi se-Indonesia, yakni pada 2021 saja sebanyak Rp 62,3 triliun.

Fenomena ini juga terjadi di daerah pinggiran Jakarta. Misalnya, kabupaten Tangerang. Angka anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang mencapai 22.194 orang. Jumlah tersebut tertinggi dibandingkan daerah lainnya di delapan Kota/kabupaten Provinsi Banten. Sementara Kabupaten Lebak berada di urutan ke 2, dengan jumlah anak putus sekolah sebanyak 16.656 orang. Kabupaten Pandeglang di posisi ke 3 dengan jumlah anak putus sekolah 11.410 orang, ke 4 Kabupaten Serang dengan jumlah anak putus sekolah 10.778.

Tidak jauh juga dari Jakarta, ada kabupaten Bogor. Jumlah angka putus sekolah di Kabupaten Bogor menjadi sorotan masyarakat luas beberapa bulan terakhir. Terlebih munculnya figur Bonge dan ABG dari Citayam di Duku Atas, Jakarta Pusat, dan kemudian terkenal dengan nama 'Citayam Fashion Week'.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor mencatat sebanyak 1.884 siswa putus sekolah di tahun 2021. Dimana, ribuan pelajar yang putus sekolah itu didominasi tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Bogor berada di angka 8,31 tahun. Artinya, sebagian besar hanya mengenyam pendidikan formal sampai kelas 8 setara Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Di daerah lain, cerita ironi dan anomali pun terjadi. Kota Solo yang belum lama ini mendapat predikat sekolah layak anak, kini tercatat angka anak putus sekolah di kota ini mencapai 1.519 anak. Selain itu, data anak putus sekolah data dari hasil pemutakhiran Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) 2019 tersebut menunjukkan 472 anak di kota ini belum pernah mendapatkan pendidikan formal. Mereka terdiri dari 367 anak usia SD/ sederajat, 67 anak usia SMP/ sederajat, serta 38 anak usia SMA/ sederajat. Beberapa faktor pemicu mereka belum bersekolah, misalnya kendala biaya dan minimnya kemampuan orang tua akibat pendidikan rendah.

Karena itu, untuk menjamin akses ke sekolah, pemerintah membuat program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. Program ini dicanangkan sebagai lanjutan dari program sebelumnya yakni Program Wajib Belajar 9 Tahun. Program ini dikenal sebagai program Pendidikan Menengah Universal (PMU), dengan payung hukum Permendikbud RI No. 80 Tahun 2013 tentang Program Menengah Universal (PMU). Program ini juga dijadikan strategi untuk menghadapi peningkatan penduduk usia produktif (bonus demografi) serta penyiapan generasi emas Indonesia 2045.

Program Wajib Belajar 12 Tahun merupakan salah satu program prioritas nasional dengan tujuan utama untuk memberikan layanan Pendidikan kepada anak Indonesia hingga jenjang SMA/ sederajat. Namun, dari Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah yang saat itu baru mencapai 57,15% (2013), hingga tahun 2022, APM nasional baru mencapai 68,9%. (Kemendikbud, 2022).

Jadi, kenyataan ini masih jauh dari target SDGs (4.1) dan juga program pemerintah "Indonesia Emas 2045", yang menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

TARGET INDONESIA EMAS 2045 DI BIDANG PENDIDIKAN

	2015	2025	2035	2045
Rata-rata Lama Sekolah	8,3 Tahun	9,5 Tahun	10,7 Tahun	12,0 Tahun
APK Perguruan Tinggi	29,9%	35%	50%	60%
Angkatan Kerja Lulusan SMA sederajat dan PT	39,3%	50%	70%	90%

(Bappenas, 2019)

Di tahun 2021, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) nasional juga baru mencapai 8,54 (tidak lulus SMP), padahal angka Harapan Lama Sekolah (HLS) seharusnya berada di angka 13,08 artinya peluang menempuh pendidikan di Indonesia sebenarnya bisa mencapai Diploma I (D1).

Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pendukung untuk pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun masih belum optimal, sehingga pemerintah pusat dan daerah harus mengevaluasi kembali kebijakankebijakan yang ada, sehingga ketercapaian program dapat lebih optimal. Jadi, masih banyak kelomok masyarakat yang masih tertinggal (*left behind*) dalam pemenuhan mendapatkan hak pendidikan yang berkeadilan.

B. KEBIJAKAN NASIONAL DAN TANTANGAN DI DAERAH

Perlu diketahui bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia ini adalah bersifat desentralisasi. Kebijakan makro menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara implementasinya adalah menjadi wewenang pemerintah daerah. Bahkan, nberdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan bidang pendidikan. Kini, SMA/SMK tak lagi menjadi wewenang kab/kota, tapi diambil alih oleh pemerintah provinsi.

Terkait dengan kebijakan Wajar 12 Tahun ini, meski sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, tapi pelaksanaannya di daerah ditemukan banyak kendala. Hal ini diakibatkan beberapa factor. Pertama, lemahnya payung hukum di level nasional. Hal ini dikarenakan UU Sisdiknas 20/2003 yang dijadikan landasan program masih berbunyi Wajib Belajar 9 Tahun. Satu-satunya payung hukum di level nasional yang

dijadikan payung hukum adalah Permendikbud RI No. 80 Tahun 2013 tentang Program Menengah Universal (PMU).

Inilah yang seringkali dijadikan alasan pemda untuk tidak serius menuntaskan program Wajar 12 Tahun. Meski begitu, semestinya Permendikbud 8/2013 ini cukup kuat dijadikan landasan pemda untuk melaksanakan program Wajar 12 Tahun. Sebab, program ini juga sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun atau sampai sekolah menengah atas.

Kedua, lemahnya political will dari pemerintah daerah yang mendukung program Wajar 12 Tahun. Hal ini bisa terlihat nyata, salah satunya adalah, dari kurangnya alokasi budget pendidikan yang bersumber dari APBD. Hal ini kemudian berakibat pada kurangnya ketersediaan sarana penunjang, seperti: pembiayaan gratis sebagaimana di jenjang SD dan SMP, quota sekolah negeri yang minim, dan juga buruknya kualitas Pendidikan di daerah.

Ketiga, minimnya kebijakan afirmasi dalam akses pendidikan untuk kelompok marginal. Mereka ini anak-anak yang putus sekolah atau potensial untuk putus sekolah. Karena itu, pemda harusnya memberikan kebijakan khusus untuk melindungi mereka supaya tidak putus sekolah. Kebijakan ini tentu saja tidak bisa disamakan dengan kebijakan untuk anak pada umumnya.

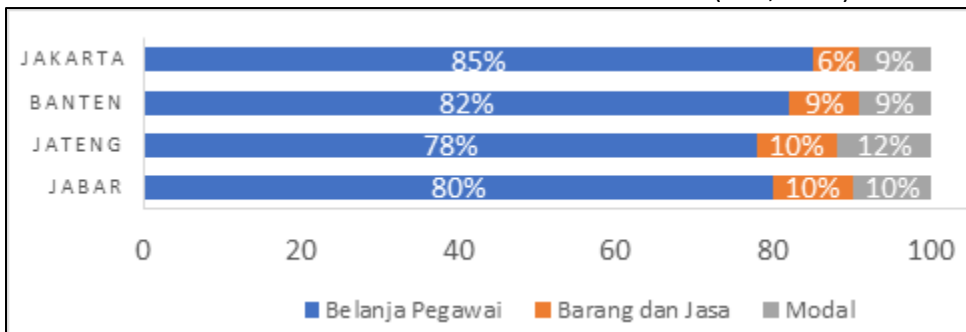
Misalnya, memberikan kebijakan kemudahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan cara alokasi kuota secara khusus. Tidak adanya kebijakan ini diperparah dengan tidak tersedianya data kelompok rentan. Data ini menjadi penting sebagai perhatian utama pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pemenuhan layanan mendapatkan hak pendidikan.

C. MINIMNYA DUKUNGAN BIAYA DAN KETERSEDIAAN SARANA

Pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menjadi problem yang serius. Meski secara nasional jumlahnya mencapai 20%. Tapi jika ditelisik lebih dalam, besaran persentasi itu sepenuhnya tidak banyak berkontribusi langsung untuk akses dan juga kualitas, tapi mayoritas hampir 81,25% tersedot untuk belanja pegawai.

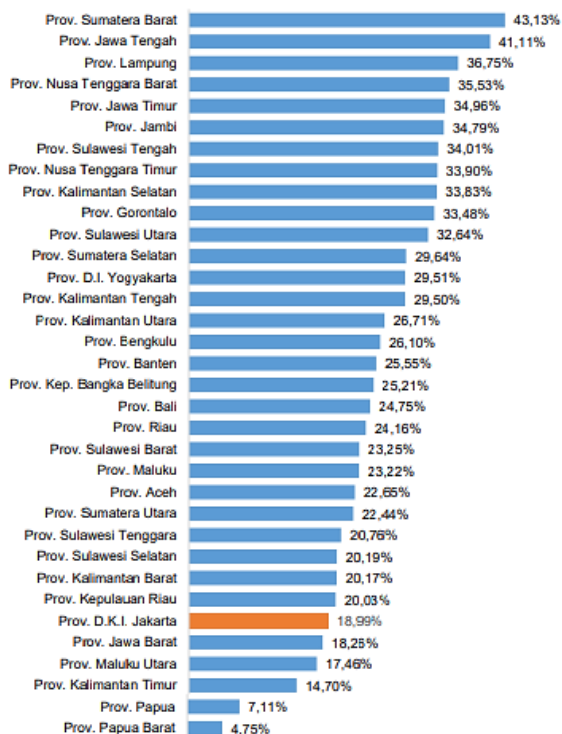
Maksud belanja pegawai di sini adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat pemerintah, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DI PROPINSI (JPPI, 2021)



Jadi, untuk komposisi inilah sebagian besar anggaran pendidikan dihabiskan. Kalau dilihat dari sisi ini tentu bisa dikatakan bahwa dukungan pembiayaan untuk mendukung Wajar 12 tahun masih sangat lemah. Sebab, untuk menguatkan akses dan kualitas pendidikan, mestinya gaji pegawai itu harus dikeluarkan dari komponen 20% untuk pendidikan. Hal ini diperburuk dengan komitmen propinsi yang ternyata masih lemah dan mengalokasikan APBD untuk pendidikan di bawah 20%, seperti di DKI Jakarta (18%), Jawa Barat (18%), Maluku Utara (17%), Kaltim (14%), Papua (7%), dan Papua Barat (4%).

ANGGARAN PENDIDIKAN DI PROPINSI 2021

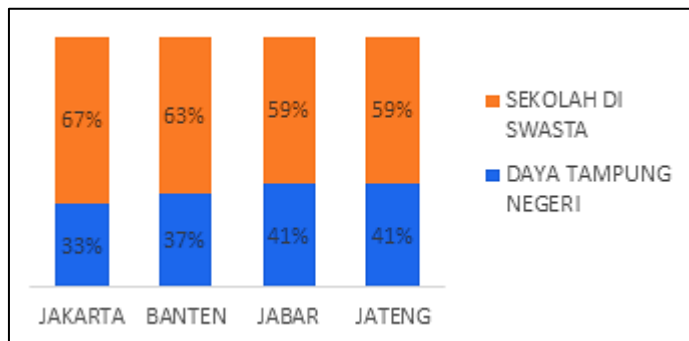


(NPD, Kemdikbud, 2021)

Pembiayaan yang minim ini, tentu saja berdampak pada pembiayaan sarana pendidikan. Minimnya sarana yang paling berdampak langsung pada akses adalah ketersediaan bangku di sekolah negeri. Sebagai contoh kasus di DKI Jakarta. Setiap tahun ajaran baru, di DKI Jakarta, terdapat sekitar 140 ribu anak lulusan SD yang mendaftarkan diri masuk SMP. Sementara di jenjang SMP, ada sekitar 150 ribu anak lulusan SMP yang mendaftarkan diri masuk ke SMA/SMK.

Berarti, dari jumlah tersebut, hanya 52% anak lulusan SD yang dapat ditampung SMP Negeri dan hanya 33% anak lulusan SMP yang bisa diterima SMA/ SMK Negeri. Selebihnya, yaitu sebanyak 67 ribu (48%) anak lulusan SD lainnya dan 103 ribu (67%) anak lulusan SMP sisanya adalah anak-anak yang diabaikan sistem PPDB yang dikembangkan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

DAYA TAMPUNG SEKOLAH NEGERI 2021



Hal ini juga terjadi di Provinsi Banten. Rendahnya partisipasi sekolah di level SMA/SMK ini, salah satunya dipengaruhi oleh daya tampung sekolah negeri yang sangat minim dibandingkan dengan jumlah peserta didik. Daya tampung kursi untuk jenjang SMAN dan SMKN di Banten sebanyak 86.000 orang. Namun, jumlah itu tidak dapat mampu menampung sebanyak 229.000 orang lulusan SMP sederajat se-Provinsi Banten. Menurut data Dapodik (data pokok pendidikan) tahun 2022 kelas 9 lebih kurang 229.000-an. Sementara daya tampung SMAN dan SMKN lebih kurang 86.000-an. Jadi, data ini menunjukkan bahwa daya tampung sekolah negeri hanya 37% dari total kebutuhan.

Minimnya daya tampung sekolah juga dialami di Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, PPDB 2022 jenjang SMA dan SMK negeri di Jateng memiliki daya tampung untuk calon peserta didik (CPD) baru sebanyak 217.781 siswa. Jumlah ini hanya sekitar 41,69% dari total lulusan SMP sederajat yang ada di Jateng, yang mencapai 522.295 orang. Dengan jumlah daya tampung yang sama (41%) juga terjadi di Jawa Barat.

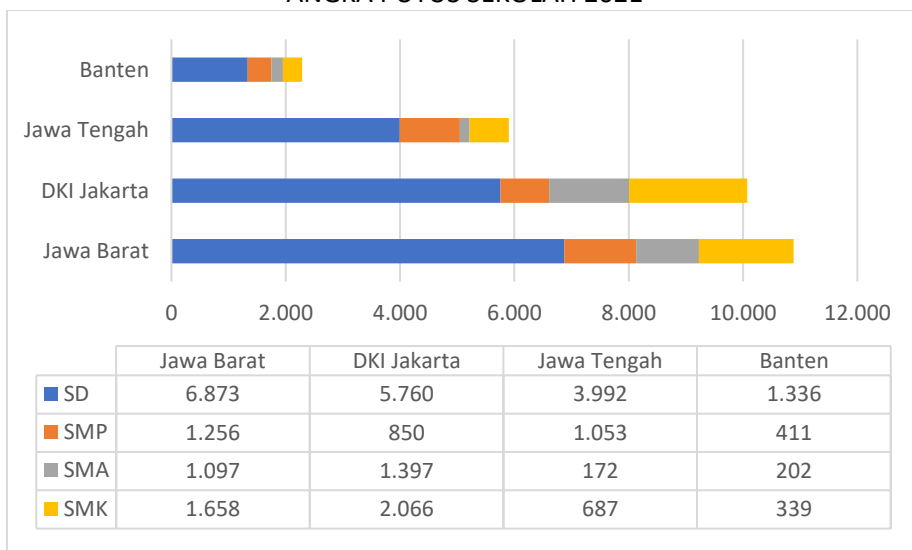
D. PUTUS SEKOLAH MASIH MERAJALELA

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, angka putus sekolah di Indonesia meningkat pada 2022. Kondisi tersebut terjadi di seluruh jenjang pendidikan, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Secara rinci, angka putus sekolah di jenjang SMA mencapai 1,38% pada 2022.

Ini menandakan terdapat 13 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang tersebut. Persentase tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Angkanya juga tercatat naik 0,26% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,12%. Angka putus sekolah di jenjang SMP tercatat sebesar 1,06% pada 2022.

Persentase tersebut juga meningkat 0,16% poin dari tahun lalu yang sebesar 0,90%. Lalu, angka putus sekolah di jenjang SD sebesar 0,13%. Persentasenya lebih tinggi 0,01% poin dibandingkan pada 2021 yang sebesar 0,12%.

ANGKA PUTUS SEKOLAH 2021



(Kemndikbudristek: 2021)

Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemndikbudristek), pada tahun ajaran 2020/2021 ada sekitar 83,7 ribu anak putus sekolah di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meliputi anak putus sekolah di tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK baik negeri maupun swasta.

Ini adalah data nasional, yang ternyata berbeda dengan kenyataan di lapangan bila dibandingkan dengan kondisi di level provinsi, bahkan kabupaten/kota. Yang berarti, jumlah angka putus sekolah jauh lebih banyak. Misalnya di provinsi Papua

Barat. Sebanyak 68.988 siswa jenjang SD/SMP hingga SMA/SMK di Provinsi Papua Barat dilaporkan putus sekolah. Mereka tersebar di 13 kabupaten/kota di Papua Barat. Rinciannya, ada 24.725 di antaranya merupakan siswa jenjang SD, lalu tingkat SMP sebanyak 25.326 orang dan tingkat SMA/SMK sebanyak 18.938 orang.

JAWA TENGAH. Tren yang sama terjadi juga di Jawa Tengah. Data pertengahan Pebruari 2022, sebanyak 45.000 anak di Jawa Tengah (Jateng) tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, atau putus sekolah. Pemicunya, tak lain karena ketiadaan biaya untuk melanjutkan pendidikan. Anak di Jateng usia 16-18 tahun yang seharusnya duduk di bangku SMA sederajat, ternyata 67,9% tidak sekolah.

Di Provinsi Jawa Tengah, kasus putus sekolah paling banyak dialami anak usia SMA sederajat. Salah satu faktor pemicunya adalah masalah ekonomi masyarakat sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Apalagi di Jawa Tengah, lima daerah yang masuk dalam data wilayah dengan kemiskinan ekstrem, sehingga banyak anak yang lebih memilih bekerja, merantau, atau pilihan lainnya seperti pernikahan anak. Dari 19 (Sembilan belas) daerah di Indonesia yang masuk dalam prioritas kemiskinan ekstrem, lima di antaranya berada di wilayah Jateng. Kelima daerah di Jateng yang masuk kategori kemiskinan ekstrem itu yakni Kabupaten Kebumen, Brebes, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas.

Di Kota Surakarta, berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) (tahun 2020) menunjukkan 1.519 anak putus sekolah dan 472 anak sama sekali tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Meskipun berdasarkan data terbaru dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun ini, jumlah anak yang putus sekolah di sudah berkurang jadi tinggal sekitar 1.000 anak saja, tapi data ini masih proses pembaruan sesuai dengan kondisi lapangan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA sederajat di Kota Surakarta baru mencapai 81,43 saja, sedangkan SD (105,95) dan SMP (92,50) artinya selaras dengan data sebelumnya, semakin ke tingkat atas angka partisipasi pendidikannya semakin menurun. Sedangkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Surakarta baru mencapai 11,25 (laki-laki) dan 10,30 (perempuan) atau setara tidak lulus SMA, jadi masih ada juga kesenjangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

JAWA BARAT. Temuan data pada Provinsi Jawa Barat, APK tingkat SD sederajat sebanyak 5.247.811 siswa, sementara APM sebanyak 4.927.685. Dari data tersebut ditemukan ada selisih 320.126 siswa yang tidak terdata secara resmi (atau kemungkinan tidak bersekolah). Pada tingkat SMP sederajat APK sebanyak 2.553.811 siswa dan APM sebanyak 1.985.192 siswa. Hal ini berarti ada selisih 568.619 antara APK dan APM.

Sedangkan pada tingkat SMA sederajat, data APK sebanyak 2.373.021 siswa dan APM sebanyak 1.716.853. siswa yang memiliki selisih 656.168 siswa. Dilihat dari data APK dan APM, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak siswa yang tidak terdata secara resmi. Bila dibandingkan antara jenjang pendidikan berdasarkan APK saja, dapat terlihat selisih dari daya tampung sekolah. Usia jenjang SD sederajat dibandingkan usia SMP sederajat, maka ditemukan selisih 2.694.000. Ini berarti ditemukan 2.694.000 jumlah siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP sederajat. Untuk selisih dari SMP sederajat ke SMA sederajat sebesar 180.790 siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau sederajat.

Di kabupaten Bogor, Angka putus sekolah ditemukan sebanyak 1.884 siswa, yang terdiri dari jenjang SD dan SMP. Untuk jenjang SD sebanyak 1.250 siswa (1.196 anak putus dari sekolah negeri, dan 54 anak putus dari sekolah swasta) dan untuk jenjang SMP sebanyak 634 siswa (134 anak putus dari SMP Negeri dan 500 anak putus dari SMP swasta). Ini menunjukkan betapa masih banyaknya anak putus sekolah di tingkat SD dan SMP.

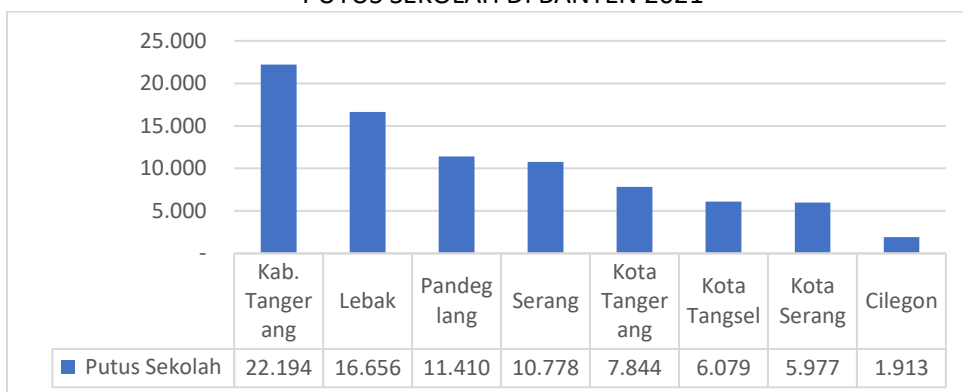
Hal ini sesuai dengan data rata-rata lama sekolah (RLS) di Bogor yang masih berada pada angka 8,31 tahun, artinya SMP saja belum tamat. Bila dibandingkan dengan skala nasional yang mencapai RLS 8,54 tahun. Maka Kabupaten Bogor berada diatas Nasional, walaupun masih lebih baik 0,01 tahun bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang berada pada skala 8,30 tahun. Yang berarti kabupaten/kota diwilayah Provinsi Jawa Barat masih tergolong tinggi RLS-nya.

Di kabupaten Cianjur, angka putus juga tergolong tinggi. Ribuan anak usia sekolah di Cianjur putus sekolah. Kebanyakan anak putus sekolah di ini, yakni di tingkat SMP dan tidak melanjutkan lagi ke jenjang SMA/SMK sederajat. Untuk siswa SD yang lulus berada di angka 38 ribu dengan persentase melanjutkan sekolah di angka 99 persen. Sedangkan untuk siswa lulusan SMP di tahun ini mencapai 29.793 siswa dengan angka partisipasi atau yang melanjutkan pendidikan formal ke jenjang SMA/SMK sederajat hanya 24.731 siswa. Berarti, untuk jenjang SD hanya sedikit yang putus sekolah, tapi untuk jenjang SMP ke SMA ini memang banyak yang tidak meneruskan atau putus sekolah, angkanya mencapai 5.062 siswa.

BANTEN. Angka putus sekolah di Banten mencapai 82.851 anak. Angka anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang mencapai 22.194 orang. Jumlah tersebut tertinggi dibandingkan daerah lainnya di delapan Kota/kabupaten Provinsi Banten. Sementara Kabupaten Lebak berada di urutan kedua, dengan jumlah anak putus sekolah sebanyak 16.656. Kabupaten Pandeglang di posisi ketiga dengan jumlah anak putus sekolah 11.410. Keempat adalah Kabupaten Serang dengan jumlah anak putus sekolah 10.778. Untuk urutan kelima disusul oleh Kota Tangerang dengan jumlah anak putus sekolah 7.844. sementara keenam yaitu Kota Tangerang Selatan

dengan jumlah anak putus sekolah 6.079 orang. Ketujuh, kota Serang dengan jumlah 5.977 dan terakhir yaitu Kota Cilegon dengan jumlah anak putus sekkolah 1.913.

PUTUS SEKOLAH DI BANTEN 2021



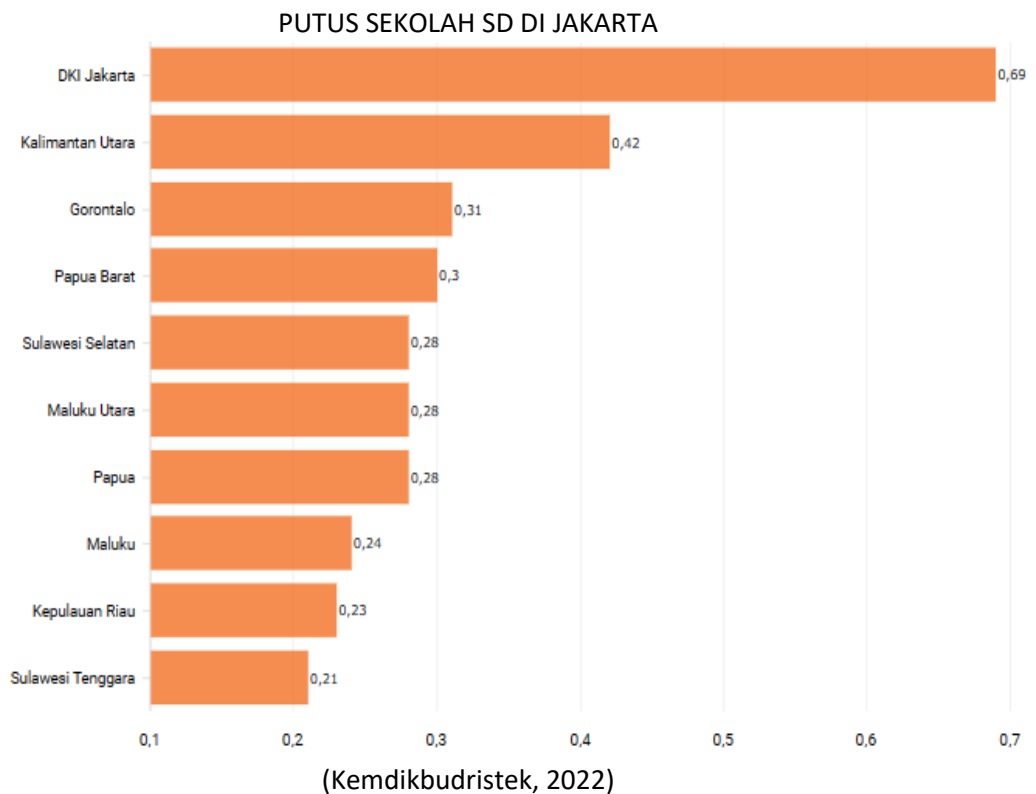
(Disdik Banten, 2021)

Dari total 22.194 anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang tersebut, berdasarkan data resmi dari Kemendikbud RI dikarenakan drop out (DO) atau berhenti sekolah serta lulus tanpa melanjutkan (LTM). Untuk tingkat sekolah dasar (SD) yang DO mencapai 2.543 dan LTM 7.251 anak. Sedangkan tingkat SMP DO 1.636 dan LTM 8.623 anak. Sementara, untuk tingkat SMA sederajat angka DO mencapai 2.104 orang.

Angka putus di sekolah di Banten ini cukup tinggi banyak dipengaruhi factor ekonomi. Di kalangan keluarga yang berpenghasilan rendah, pendidikan bukanlah prioritas. Kemiskinan juga mengharuskan anak-anak untuk bekerja. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat sebanyak 4,1 juta penduduk di Provinsi Banten masuk kategori miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud adalah, kondisi warga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.

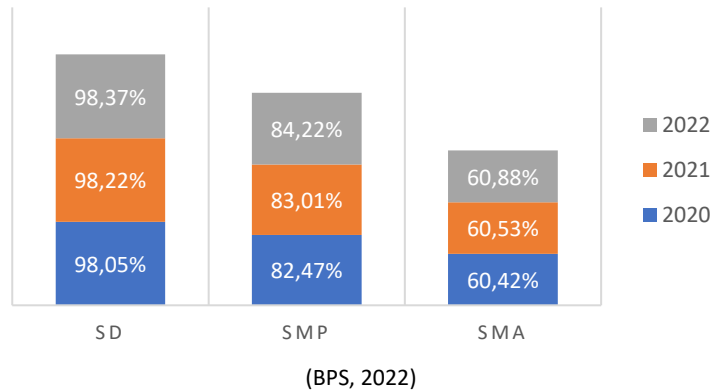
Mengacu definisi Bank Dunia, kemiskinan ekstrem sebagai kondisi di mana penduduk hanya mengantongi pendapatan kurang dari US\$1,9 per hari atau sekitar Rp27.075 per hari (asumsi kurs Rp14.250 per dolar AS). Jika dihitung dari angka persentase jumlah penduduk di Provinsi Banten, angka kemiskinan ekstrem terbanyak berada di Kabupaten Pandeglang hampir 50 persen penduduk Pandeglang masuk dalam kategori tersebut. Dari 100 penduduk Pandeglang, 46,94 persen atau 47 orang mengalami kemiskinan ekstrem.

JAKARTA. Angka putus sekolah bagi siswa SD di Jakarta tertinggi nasional. Data ini bersumber dari data angka putus sekolah Kemdikbudristek 2021. Angka putus sekolah di kalangan murid Sekolah Dasar (SD) secara nasional berada di level 0,18% pada tahun ajaran 2020/2021. Angka tersebut diperoleh dari jumlah murid yang putus sekolah dibagi dengan jumlah murid secara keseluruhan, kemudian dikalikan 100%.



Adapun menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), DKI Jakarta memiliki angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 0,69%. Kalimantan Utara menempati urutan kedua dengan angka putus sekolah murid SD sebanyak 0,42%. Disusul Gorontalo dan Papua Barat dengan angka putus sekolah masing-masing 0,31% dan 0,30%.

TREN APM DKI JAKARTA 2020-2022

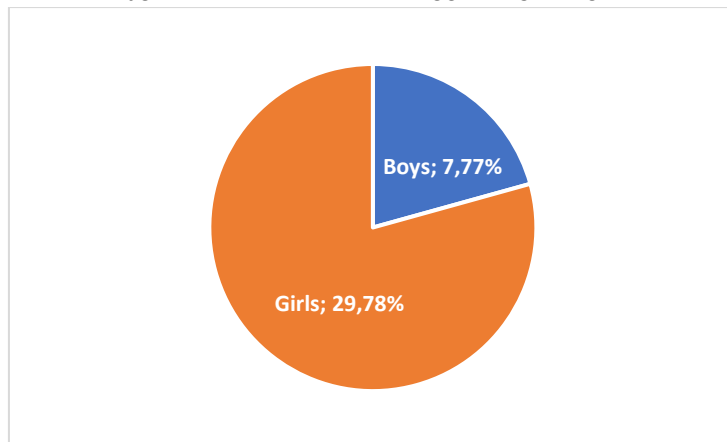


Problem akses di DKI Jakarta tidak hanya di SD. Berdasarkan data BPS, partisipasi sekolah rendah terjadi di jenjang SMA yang trennya dari tahun ke tahun tidak beranjak dari angka 60%, sedangkan jenjang SMP juga partisipasinya masih berkutat pada kisaran angka 80%. Angka ini tergolong besar, apalagi DKI Jakarta adalah ibu kota negara dengan jumlah APBD yang terbesar se-Indonesia.

E. PEREMPUAN KIAN RENTAN PUTUS SEKOLAH

Di Indonesia, perempuan mengalami tingkat kerentanan lebih tinggi dalam putus sekolah. Berdasarkan data Indonesia Governance Index, ternyata anak perempuan lebih cepat 1,5 tahun untuk putus sekolah dibandingkan anak laki-laki. Ini mengakibatkan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan layanan pendidikan yang berkeadilan. Salah satu faktor yang menyebabkan perempuan putus sekolah adalah pernikahan dini.

JUMLAH PERNIKAHAN DINI USIA < 19 TAHUN



(BPS, Maret 2022)

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), ditemukan fenomena pernikahan dini di Indonesia. Usia kawin pertama pemudi perempuan masih banyak di bawah usia 19 tahun (29,78%). Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan pemuda laki-laki, di mana hanya 7,77% usia kawin pertamanya di bawah 19 tahun. Ini adalah angka yang besar. Jika dibulatkan, pernikahan dini bagi perempuan hampir mencapai angka 30%.

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin terlihat pola berbeda. Usia kawin pertama laki-laki mayoritas pada 22-24 tahun (35,21 %) dan 25-30 tahun (30,52%), sedangkan pada perempuan paling banyak berada pada usia 19-21 tahun (37,27%). Hal ini menunjukkan kecenderungan pemuda laki-laki di Indonesia perkawinan pertamanya pada usia yang lebih matang dibandingkan pemudi perempuan.

Di Banten, berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat hampir 19,5 persen pernikahan muda terjadi di Banten. Rata-rata mereka masih di bawah 19 tahun. Bahkan di Banten Selatan banyak pernikahan masih di bawah umur kerap terjadi di daerah pedesaan.

Sementara di Jawa Tengah, data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa pernikahan anak terjadi di hampir seluruh wilayah di Jateng. Mulai dari Jepara, Pati, Blora, Grobogan, Cilacap, Brebes, Banjarnegara, Purbalingga dan beberapa kabupaten/kota lain di Jateng.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, angka perkawinan anak atau pernikahan dini di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Data dari DP3AP2KB Jawa Tengah menyebutkan, angka pernikahan dini mencapai 2.049 pada tahun 2019. Namun, melonjak drastis ketika masa pandemi tiba hingga mencapai 12.972 kasus. Jumlah itu, terus meningkat pada tahun 2021 yang mencapai 13.595 kasus.

Pernikahan dini di Jawa Barat juga tergolong tinggi. Pemprov Jawa Barat mencatat sebanyak 5.523 pasangan telah melangsungkan pernikahan dini pada 2022. Ribuan anak tersebut bisa menikah setelah permohonan dispensasi menikahnya diterima Pengadilan Agama (PA). Permohonan dispensasi menikah hingga Desember 2022 tercatat mencapai 5.777 permohonan. Dari ribuan permohonan tersebut, 5.523 permohonan telah dikabulkan pengadilan.

Rincian pernikahan anak paling tinggi terjadi di Kabupaten Garut dengan 570 pernikahan. Kemudian 564 pernikahan di Indramayu, 541 pernikahan di Ciamis, 480 di Cirebon, dan sisanya di bawah 400 pernikahan. Faktor terjadinya pernikahan anak masih didominasi kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Bahkan berdasarkan

catatan PA, anak yang menikah mayoritas terjadi karena calon mempelai perempuannya sudah hamil terlebih dahulu.

DKI Jakarta juga masih mencatat pernikahan dini (sebelum 19 tahun) mencapai 4,68% berdasarkan data BPS 2021. Di daerah Jakarta Timur saja, angkanya mencapai 93.332 anak. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan. Ironisnya, banyak di antara jumlah tersebut harus menikah karena hamil di luar nikah.

Fenomena pernikahan dini ini berakibat pada putus sekolah. Bahkan saat ini di Indonesia sedang populer fenomena “janda usia sekolah” (JUS). Jadi, mereka ini adalah sudah menyandang status janda tapi masih berusia sekolah. Tentu saja ini terjadi karena pernikahan dini. Namun, belum ada data spesifik kasus JUS ini.

Berdasarkan data BKKBN, dari seribu perempuan usia 15-19 tahun yang pernah hamil dan melahirkan, ditemukan 20 perempuan masuk dalam kategori JUS. Perkawinan anak ini merupakan bentuk kekerasan paling kejam. Karena pernikahan dini sama saja merebut masa depan anak.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan:

1. Hingga kini Indonesia masih terbelenggu problem akses pendidikan yang berkeadilan bagi semua. Partisipasi sekolah terendah ditemukan pada jenjang SMA atau sederajat. Angka partisipasi murni masih di angka 68,9%. Tentu ini masih jauh dari target SDGs 4.1, yang menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. ini menunjukkan program wajib belajar 12 tahun, belum terlaksana dengan baik di daerah.
2. Alokasi anggaran dan ketersediaan sarana pendidikan menjadi problem dalam layanan pendidikan yang berdampak langsung pada putus sekolah dan akses yang masih rendah. Anggaran pendidikan yang banyak terserap pada komponen gaji pegawai, menyebabkan kurangnya infrastruktur sekolah dan minimnya daya tampung sehingga tidak sebanding dengan jumlah peserta didik.
3. Ada kesan di masyarakat, bahwa wajib belajar 12 tahun itu hanya terjadi di sekolah negeri. Sementara di sekolah swasta masyarakat masih harus menguras kantongnya untuk membayar biaya anak bersekolah. Padahal, berdasarkan amanah UUD 45, pendidikan adalah tanggung jawab

pemerintah, yang mestinya tak perlu ada pebeda anak Indonesia yang sekolah di negeri dan swasta.

4. Putus sekolah lalu menjadi pekerja anak adalah fenomena yang jamak ditemukan di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan, ini terjadi Ibu Kota dan daerah-daerah penyangga ibu kota. Dengan begitu, angka putus sekolah ini akan lebih besar ditemukan di daerah-daerah terpencil dan minim fasilitas. Di antara penyebabnya adalah faktor kemiskinan, minimnya infrastruktur sekolah, mahalnya sekolah swasta, dan juga pernikahan anak.
5. Kesenjangan laki-laki dan perempuan di Indonesia dalam dunia pendidikan masih terjadi. Salah satunya fenomena yang berkontribusi pada kesenjangan ini adalah banyaknya anak putus sekolah dari kalangan perempuan akibat pernikahan dini. Dari jumlah perempuan yang menikah, ditemukan angka hampir 30% mereka menikah di usia dini. Ini tentu mengakibatkan anak perempuan putus sekolah.

Rekomendasi:

1. Kemdikbudristek, Kemenag, Kemendagri dan juga Pemerintah Prov/Kab/Kota harus melakukan pendataan anak putus sekolah secara update dan online sehingga mudah diakses oleh semua pihak. Data ini penting digunakan untuk memberikan afirmasi kebijakan bagi anak putus sekolah, terutama di musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dinas pendidikan bisa bekerjasama dengan pemerintah desa, pengurus RT/RW, dan juga partisipasi masyarakat dalam melakukan pendataan dan membantu dalam proses PPDB.
2. Pada saat PPDB, pemerintah pusat dan daerah harus memberikan kebijakan khusus dengan memberikan kemudahan untuk mendaftar bagi kelompok rentan putus sekolah, antara lain: anak dari keluarga miskin, perempuan, difabel, korban kekerasan, pengungsi, dan juga kelompok minoritas. Mereka tidak hanya diminta untuk mendaftar, tapi mereka juga perlu pendampingan khusus dalam proses pendaftaran.
3. 'Political will' dari pemerintah daerah sangat diharapkan untuk dapat mengalokasikan anggaran pendidikan dalam mendukung jaminan hak bagi seluruh anak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Pemerintah daerah harus menyediakan kuota bangku sekolah sesuai dengan jumlah peserta didik untuk bisa bersekolah dengan gratis, baik di negeri maupun swasta. Sebab, pemenuhan hak anak untuk mendapatkan sekolah adalah menjadi kewajiban pemerintah.

4. Kebijakan anggaran pendidikan 20 persen itu harus ditinjau ulang. Sebab, kebutuhan yang terlalu banyak tidak sebanding dengan dana yang tersedia. Jadi, 20 persen itu adalah batas minimal, jadi pemerintah (baik pusat maupun daerah) harus meningkatkan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk di daerah, idealnya anggaran pendidikan yang minimal 20 persen itu adalah diluar dana transfer dari pusat, alias murni bersumber dari APBD.
5. Kemendikbudristek bersama dengan Kemenag harus membuat strategi bersama pencegahan pernikahan dini di sekolah/madrasah/pesantren. Termasuk memasukkan materi pembelajaran tentang kesehatan reproduksi yang terintegrasi dalam kurikulum. Hal ini penting untuk mengurangi angka putus sekolah disebabkan oleh pernikahan dini. []